

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN 2018-2022

MEMORI



Drs. FARID MA'RUF, ST, MM

*“ ASN harus dapat menjadi **tuntunan** masyarakat bukan menjadi **tontonan** masyarakat”*

Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM
(Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap 2018-2022)



Drs. FARID MA'RUF, S.T.,M.M.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2018-2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita sehingga Saya dapat menyelesaikan pengabdian Saya sebagai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Cilacap. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu kiranya disusun Laporan Pelaksanaan Tugas (Memori) Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022 sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan.

Laporan ini berisi tentang hasil-hasil yang telah dicapai selama Saya mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap dan hal-hal perlu untuk diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan yang telah dicapai bukanlah semata-mata merupakan hasil kerja sendiri namun merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Cilacap. Untuk itu Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan, bantuan dan kerjasamanya sehingga kebijakan, program dan kegiatan dapat terwujud dengan baik.

Disamping keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih ada beberapa kekurangan dan hal-hal yang belum dapat terwujud hingga berakhirnya masa pengabdian Saya. Untuk itu Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga hal tersebut dapat diteruskan oleh pengemban amanah selanjutnya.

Akhirnya Saya mohon diri untuk melanjutkan pengabdian saya sebagai masyarakat Kabupaten Cilacap.

Sekian dan terima kasih.

Cilacap, 31 Maret 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP**



Drs. FARID MA'RUF, ST, MM
Pembina Utama
NIP. 19620322 198607 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	3
A. Dasar Hukum.....	3
B. Kedudukan Dalam Organisasi.....	3
C. Sumber Daya Manusia.....	6
D. Sarana dan Prasarana.....	8
BAB III HASIL PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH.....	13
A. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.....	13
B. Pelaksanaan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat..	32
C. Pelaksanaan Bidang Perekonomian Dan Pembangunan.....	42
D. Pelaksanaan Bidang Administrasi Umum.....	48
BAB IV CATATAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI.....	60
BAB V PENUTUP.....	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berakhirnya masa pengabdian Sekretaris Daerah, Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM pada 1 April 2022, maka perlu disusun Laporan Pelaksanaan Tugas (Memori) Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM. sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi Sekretaris Daerah serta sebagai bahan penentuan kebijakan Sekretaris Daerah selanjutnya.



Pelantikan Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM sebagai Sekretaris Daerah
Kabupaten Cilacap

Sejak 21 Maret 2018, Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. Selama menjabat, telah banyak perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cilacap termasuk ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Namun demikian, Laporan Pelaksanaan Tugas (Memori) ini hanya memuat hal-hal yang perlu disampaikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : menyediakan dokumen hasil kinerja Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM selama menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah.

Tujuan :

1. Memberikan gambaran hasil kinerja Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM sebagai Sekretaris Daerah
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas Drs. Farid Ma'ruf ST, MM sebagai Sekretaris Daerah, dan
3. Sebagai bahan penyusunan kebijakan bagi Sekretaris Daerah selanjutnya

C. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (Memori) Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI

berisi kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, kondisi sarana dan prasarana serta kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

BAB III HASIL PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH

berisi hasil-hasil dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang disusun berdasarkan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan serta bidang Administrasi Umum

BAB IV CATATAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

berisi kebijakan / program / kegiatan yang belum terselesaikan hingga berakhirnya masa pengabdian.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Dasar Hukum

1. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

B. Kedudukan Dalam Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten, terdiri dari :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - c) Bagian Hukum
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - a) Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
 - b) Bagian Organisasi
 - c) Bagian Umum
 - d) Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pembinaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - a. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah melalui rapat koordinasi secara berkala guna terwujudnya keterpaduan dan kelancaran

- pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf ahli sesuai dengan bidang tugasnya melalui forum koordinasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - f. mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama antar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan perluasan hubungan kerja daerah;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pimpinan daerah dan kunjungan kerja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengoordinasikan penyusunan dokumen kinerja dan pelaporan kinerja serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menetapkan dokumen dan pelaporan kinerja serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah;
 - k. menyelenggarakan pembinaan administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah agar tercipta tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - l. menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah agar terwujud aparatur pemerintah yang profesional dan berkinerja tinggi;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - n. mengendalikan pelaksanaan tugas Asisten-Asisten dan Bagian- Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- o. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- p. menyampaikan saran dan masukan kepada bupati untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap per 31 Desember 2021 sejumlah 153 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
a.	PNS	140 orang
b.	CPNS	13 orang
	Jumlah	153 orang

2. Berdasarkan Golongan :

No	Golongan Ruang	Jumlah
a	Golongan I a	0 orang
b	Golongan I b	0 orang
c	Golongan I c	2 orang
d	Golongan I d	2 orang
e	Golongan II a	4 orang
f	Golongan II b	2 orang
g	Golongan II c	15 orang
h	Golongan II d	18 orang
i	Golongan III a	26 orang
j	Golongan III b	28 orang
k	Golongan III c	20 orang

No	Golongan Ruang	Jumlah
l	Golongan III d	20 orang
m	Golongan IV a	1 orang
n	Golongan IV b	8 orang
o	Golongan IV c	6 orang
p	Golongan IV d	0 orang
q	Golongan IV e	1 orang
	Jumlah	153 orang

3. Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
a	SD	4 orang
b	SLTP	8 orang
c	SLTA	38 orang
d	D I	0 orang
e	D II	0 orang
f	D III	9 orang
g	D IV / S1	64 orang
h	S2	30 orang
i	S3	0 orang
	Jumlah	153 orang

4. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
a.	Laki-laki	108 orang
b.	Perempuan	45 orang
	Jumlah	153 orang

5. Berdasarkan Tingkat Umur

No.	TINGKAT UMUR	Jumlah
a	18-25	5 orang
b	26-30	13 orang
c	31-35	14 orang
d	36-40	17 orang
e	41-45	25 orang
f	46-50	27 orang
g	51-55	30 orang
h	>=56	22 orang
	Jumlah	153 orang

D. Sarana dan Prasarana

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ,juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Setda Kabupaten Cilacap dapat dilihat sebagai berikut

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021

No	Nama/Jenis	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Station Wagon	27	-	27
2	Mini Bus	2	-	2
3	Micro Bus	2	-	2

No	Nama/Jenis	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
4	Pick Up	2		2
5	Jeep	1	-	1
6	Sepeda Motor	55	1	56
7	Viar	1		1
8	Truck	1		1
9	Alat Penghancur Kertas	8	4	12
10	CCTV	22	-	22
11	LCD Proyektor	13	6	19
12	Alat Studio Video	18	1	19
13	Rak Penyimpanan	11	-	11
14	Mesin Ketik Manual	7	7	14
15	Dispenser	20	2	22
16	Lemari Besi	76	6	82
17	Lemari Kayu	38	5	43
18	Lemari Kaca	19		19
19	Rak Besi/Metal	29	4	33
20	Filling Besi/Metal	87	9	96
21	Brand Kas	9	2	11
22	Handytalky	24		24
23	Infrared Thermometer	8		8
24	Kursi besi/metal	744	5	749
25	Kursi Kayu	17	26	43
26	Kursi hadap	23		23
27	Kursi kerja pegawai	35	13	48
28	Kursi kerja pejabat	65	6	71
29	Kursi Lipat		365	365
30	Kursi Putar	25	20	45

No	Nama/Jenis	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
31	Kursi Rapat	381	-	381
32	Kursi Tamu	12	7	19
33	Laptop	89	11	100
34	Layar proyektor	16	1	17
35	Lemari Buku	4		4
36	Meja 1/2 biro	55		55
37	Meja kerja	378	39	417
38	Meja kerja pejabat	29	1	30
39	Meja Komputer	39	6	45
40	Meja Rapat	75	-	75
41	White Board	14	-	14
42	Mesin ketik	8	7	15
43	Kulkas	11		11
44	Mesin Absensi	8	-	8
45	Meja resepsionis	3		3
46	Meja Tamu	4	2	6
47	Meja Telpon	8	-	8
48	Mesin pengering tangan	11		11
49	Vacuum	2		2
50	Microphone	56	17	73
51	Mimbar	4		4
52	PC unit	101	14	115
53	Peralatan Komputer lainnya	12	10	22
54	AC Split	140	18	158
55	Kipas Angin	15	2	17
56	Water Cooler	10	1	11
57	Televisi/ Display	39	6	45

No	Nama/Jenis	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
58	Pesawat Telepon	17	3	20
59	Amplifier	13	-	13
60	Portable Genset	3		3
61	Loudspeaker	24	1	25
62	Pompa air	8		8
63	Sound System	14	1	15
64	Printer	90	15	105
65	Sofa	38		38
66	Stationary Generating set	1		1
67	Tablet PC	3		3
68	Alat kedokteran	5	1	6
69	Tripod Kamera	4		4
70	Handy Cam	3	-	3
71	Video Conference	1		1
72	Video Distribution Amplifier	1	1	2
73	Video monitor (videotron)	1		1
74	Video mixer	1		1
75	Wireless	3	1	4
76	Wireless Amplifier	10		10
77	Faximile	15	4	19

Sumber: Setda Kabupaten Cilacap

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Setda Kabupaten Cilacap berkaitan dengan kapasitas gedung yang sudah memadai. Selain

itu, ruang rapat yang ada juga sudah cukup memadai dan ditunjang lahan parkir yang cukup luas.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen Setda Kabupaten Cilacap.

BAB III

HASIL PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DAERAH

Hasil pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, capaian indikator kinerja pada kelompok ekonomi dan pembangunan, dan pada kelompok administrasi umum. Secara rinci kinerja unsur sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Persentase Kebutuhan Kepala Daerah yang terlayani sesuai standar					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
2	Persentase kinerja Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan sesuai dengan target fisik yang direncanakan					100	100	100	100	100	100	99,2	100	100	100			99	100	100	100	0	0	
3	Persentase OPD memiliki RKA dan DPA sesuai dengan dokumen RKPD dan APBD					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
4	Persentase produk hukum yang dipublikasian					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
6	Persentase penyerapan APBD					85	85	85	85	85	85	91,09	89,93	87,44	89,28			107	106	103	105	0	0	
7	Persentase realisasi penyaluran hibah infrastruktur terhadap rekomendasi					85	85	85	85	85	85	68,15	94,74	88,25	44,93			80	111	104	53	0	0	
8	Persentase Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan, standar operasional prosedur dan inovasi pelayanan publik						58	73	82	92	100	n/a	60	73	83			0	103	100	102	0	0	

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
9	Persentase Perangkat daerah/unit kerja yang telah menetapkan jabatan ASN sesuai ANJAB, ABK, EVJAB dan standar kompetensi jabatan					50	60	70	80	90	100	100	100	100	100			200	167	143	125	0	0	
10	Persentase Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM					55	65	75	85	95	100	100	100	100	100			182	154	133	118	0	0	
11	Persentase ketersediaan koordinasi bidang organisasi sesuai kebutuhan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
12	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian kinerja tepat waktu					42	50	55	57,5	60	62,5	100	100	100	100			238	200	182	174	0	0	

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
13	Persentase Indikator Kinerja Program pada Roadmap RB yang tercapai					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
14	Persentase Perangkat Daerah dengan SOTK yang sesuai peraturan per UU an yang berlaku					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
15	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai kebutuhan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
16	Persentase perolehan prestasi bidang Kesra					6,25	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	6,25	6,25	9,4	0			100	66	100	0	0	0	
17	Persentase proposal hibah sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti					80	80	80	80	80	80	80	90	87	84			100	113	109	105	0	0	

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	Naskah				21	4	5	5	5	5	21	24	23	21			100	600	460	420	0	0	
19	Persentase tertib administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan						12,5	25	37,5	50	62,5	n/a	12,5	25	25			0,0	100	100	67	0	0	
20	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan sesuai kebutuhan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
21	Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD					4,48	4,52	4,53	4,67	4,81	4,95	99,88	102,23	100,38	99,32			2229	2262	2216	2127	0	0	
22	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Perekonomian sesuai kebutuhan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
23	Persentase penyerapan anggaran Setda					88	85	85	85	85	85	88	86,1	89,7	90,29			100	101	106	106	0	0	
24	Persentase aset Setda dalam kondisi baik					99,7	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
25	Persentase pengadaan barang dan jasa yang melalui Unit Layanan Pengadaan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
26	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	100	0	0	
27	Persentase naskah kehumasan yang diterbitkan					100	100	100	100	100	100	97	90	81	94			97	90	81	94	0	0	
28	Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan					100	100	100	100	100	100	97	90	81	94			97	90	81	94	0	0	

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
29	Persentase penyerapan anggaran Setda					0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	92		0	0	0	0	108	0	*)
30	Persentase aset Setda dalam kondisi baik					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0	0	0	0	100	0	*)
31	Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat sesuai kebutuhan					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	87,4		0	0	0	0	87	0	*)
32	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai standar					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0	0	0	0	100	0	*)
33	Nilai SAKIP	skor				0	0	0	0	71	72	0	0	0	0	79,83		0	0	0	0	112	0	*)
34	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan sesuai kebutuhan					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0	0	0	0	100	0	*)

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
35	Persentase tertib administrasi kewilayahan yang sesuai dengan ketentuan					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0	0	0	0	100	0	*)
36	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	dok				0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	49		0	0	0	0	980	0	*)
37	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai kebutuhan					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0	0	0	0	100	0	*)
38	Persentase perolehan prestasi bidang Kesra					0	0	0	0	9,4	9,4	0	0	0	0	11,11		0	0	0	0	118	0	*)
39	Persentase proposal hibah sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti					0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	100		0	0	0	0	125	0	*)

No	Indikator	Sat	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
40	Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	95		0	0	0	0	95	0	*)
41	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Perekonomian sesuai kebutuhan					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0	0	0	0	100	0	*)
42	Persentase penyerapan APBD					0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	94		0	0	0	0	111	0	*)
43	Persentase pengadaan barang dan jasa yang melalui Unit Layanan Pengadaan					0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0	0	0	0	100	0	*)

*) Perubahan indikator menyesuaikan Permen 90 (mulai Tahun 2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2021 dari 43 indikator kinerja pelayanan Setda Kabupaten Cilacap yang tercantum dalam Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, indikator pencapaiannya sudah baik. Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Setda untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Setda Kabupaten Cilacap dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Setda Kabupaten Cilacap yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap, disajikan pada Tabel berikut ini :

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Non Program	15.863.014.000	17.572.978.000	18.896.051.000	21.044.600.000	-	15.141.291.657	15.800.318.529	17.373.049.795	19.603.440.014	-	95,45	89,91	91,94	93,15	0,00	2	8,2
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	95.176.200	100.000.000	-	-	-	82.860.450	78.170.900	-	-	-	87,06	78,17	0,00	0,00	0,00	4,8	-2,0
Perencanaan Tata Ruang	65.000.000	180.000.000	-	-	-	63.258.500	144.162.000	-	-	-	97,32	80,09	0,00	0,00	0,00	63,9	18,7
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.447.700.000	2.310.060.000	-	-	-	2.231.897.600	1.960.746.556	-	-	-	91,18	84,88	0,00	0,00	0,00	-6,0	-4,6
Pendidikan Politik Masyarakat	50.000.000	60.000.000	-	-	-	44.500.350	53.118.400	-	-	-	89,00	88,53	0,00	0,00	0,00	16,7	5,4
Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	251.180.100	265.000.000	-	-	-	200.648.900	228.091.000	-	-	-	79,88	86,07	0,00	0,00	0,00	5,2	4,0
Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	148.800.000	220.000.000	-	-	-	138.739.200	193.833.100	-	-	-	93,24	88,11	0,00	0,00	0,00	32,4	9,5

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	261.000.000	353.310.000	-	-	-	254.946.000	306.014.500	-	-	-	97,68	86,61	0,00	0,00	0,00	26,1	5,6
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	187.500.000	270.000.000	-	-	-	142.454.150	248.648.800	-	-	-	75,98	92,09	0,00	0,00	0,00	30,6	14,2
Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	200.000.000	715.000.000	-	-	-	189.675.000	622.470.200	-	-	-	94,84	87,06	0,00	0,00	0,00	72,0	23,2
Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	490.000.000	480.000.000	-	-	-	122.990.750	173.157.500	-	-	-	25,10	36,07	0,00	0,00	0,00	-2,1	9,7
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	56.000.000		-	-	-	54.921.400	-	-	-	-	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Pembinaan Dan Pemasyarakatan OR	550.000.000	555.000.000	-	-	-	528.333.000	495.250.000	-	-	-	96,06	89,23	0,00	0,00	0,00	0,9	-2,2

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	175.000.000	225.000.000	-	-	-	132.786.900	208.882.325	-	-	-	75,88	92,84	0,00	0,00	0,00	22,2	12,1
Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	50.000.000	55.000.000	-	-	-	46.001.000	46.305.000	-	-	-	92,00	84,19	0,00	0,00	0,00	9,1	0,2
Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	190.000.000	148.000.000	-	-	-	182.605.950	137.350.700	-	-	-	96,11	92,80	0,00	0,00	0,00	-28,4	-11,0
Pengembangan Wilayah Transmigrasi	115.000.000	-	-	-	-	87.382.375	-	-	-	-	75,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.666.217.500	10.982.044.000	9.984.553.600	5.933.800.000	-	7.588.729.444	9.007.994.306	8.901.531.316	5.271.393.295	-	78,51	82,02	89,15	88,84	0,00	-22,1	-18,1
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	4.449.145.000	5.315.800.000	1.271.300.000	919.709.100	-	3.782.885.081	4.174.680.184	953.318.300	742.529.202	-	85,02	78,53	74,99	80,74	0,00	-113,4	-119,0

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Disiplin Aparatur	120.000.000	111.000.000	305.000.000	30.500.000	-	116.945.000	108.560.000	288.554.000	30.460.000	-	97,45	97,80	94,61	99,87	0,00	-281,5	-264,2
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.451.000.000	2.841.600.000	150.000.000	58.400.000	-	1.315.950.445	2.507.153.164	123.665.000	56.730.600	-	90,69	88,23	82,44	97,14	0,00	-634,1	-665,9
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	439.500.000	324.000.000	-	-	-	432.827.000	310.146.200	-	-	-	98,48	95,72	0,00	0,00	0,00	-11,9	-13,2
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.169.500.000	4.694.800.000	3.828.180.000	3.118.187.200	-	3.670.135.415	4.343.165.035	3.258.334.622	2.980.056.433	-	88,02	92,51	85,11	95,57	0,00	-11,4	-9,0
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelangan Keuangan Daerah	537.000.000	150.000.000	-	-	-	448.642.450	128.408.500	-	-	-	83,55	85,61	0,00	0,00	0,00	-86,0	-83,1

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	116.425.000	125.000.000	689.618.900	361.992.000		106.544.000	122.849.650	613.241.450	330.140.450	-	91,51	98,28	88,92	91,20	0,00	-0,6	2,5
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	509.975.000	726.500.000	-	-	-	358.835.925	545.420.250	-	-	-	70,36	75,08	0,00	0,00	0,00	9,9	11,4
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	250.000.000	243.400.000	-	-	-	231.682.500	232.328.000	-	-	-	92,67	95,45	0,00	0,00	0,00	-0,9	0,1
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	55.000.000	30.000.000	-	-	-	45.797.875	23.894.000	-	-	-	83,27	79,65	0,00	0,00	0,00	-27,8	-30,6
Penataan Peraturan PerUUan	1.745.134.000	1.872.000.000	1.000.084.550	346.455.900	-	1.631.500.849	1.628.419.200	938.899.850	305.783.560	-	93,49	86,99	93,88	88,26	0,00	-89,7	-93,6

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah	512.000.000	445.000.000	-	-	-	417.039.750	368.899.100	-	-	-	81,45	82,90	0,00	0,00	0,00	-5,0	-4,3
Pendidikan Non Formal		288.000.000	-	-	-		264.966.300	-	-	-	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	33,3	33,3
Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	-	-	10.000.000	14.295.000	-	-	-	8.220.000	14.295.000	-	0,00	0,00	82,20	100,00	0,00	43,3	47,5
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	1.291.595.200	577.643.800	-	-	-	1.129.266.400	560.960.700	-	0,00	0,00	87,43	97,11	0,00	-7,9	-0,4
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	2.593.143.100	1.339.814.400	-	-	-	2.352.358.500	1.263.333.100	-	0,00	0,00	90,71	94,29	0,00	2,2	4,6
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	-	-	3.753.313.903	1.143.726.500	-	-	-	3.501.400.520	371.929.500	-	0,00	0,00	93,29	32,52	0,00	-42,7	-247,1
Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	769.911.300	244.321.500	-	-	-	695.145.100	181.715.900	-	0,00	0,00	90,29	74,38	0,00	-38,4	-60,8

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah	-	-	1.475.105.400	627.110.950	-	-	-	1.206.886.219	377.819.040	-	0,00	0,00	81,82	60,25	0,00	-11,7	-39,8
Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda	-	-	5.379.554.100	3.336.500.400	-	-	-	4.867.993.325	3.174.345.947	-	0,00	0,00	90,49	95,14	0,00	12,9	15,5
Kehumasan dan Keprotokolan	-	-	1.530.142.100	943.309.761	-	-	-	1.287.654.000	887.420.252	-	0,00	0,00	84,15	94,08	0,00	12,6	18,3
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-	-	-	42.120.091.831	-	-	-	-	39.081.427.089	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79		
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	26.567.167.200	-	-	-	-	24.563.416.800	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46		

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
PEREKONOMI AN DAN PEMBANGU NAN	-	-	-	-	17.301.502.328	-	-	-	-	15.584.083.250	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07		
JUMLAH	45.216.266.800	51.658.492.000	52.927.553.153	40.040.366.511	85.988.761.359	39.792.808.916	44.463.403.399	47.499.518.397	36.152.352.993	79.228.927.139	63,30	60,67	34,18	33,72	6,72	-24,91	-34,76

B. Pelaksanaan Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Cilacap, dapat dilihat dari nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebagaimana PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah evaluasi yang dilakukan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota. Capaian Indikator Kinerja nilai EKPPD masih menggunakan nilai capaian tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2019 dikarenakan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum keluar dari tim penilai. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2019, atas LPPD 2018 nilai yang dicapai oleh Pemkab Cilacap dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah 3,1104 dengan kategori SANGAT TINGGI atau tercapai sebesar 115,2 dari target yang ditetapkan 2,700.

Tabel Pencapaian Nilai EKPPD Kabupaten Cilacap

TAHUN		SKOR	PREDIKAT	PERINGKAT NASIONAL	KETERANGAN
LPPD	EKPPD				
2017	2018	2,9807	TINGGI	122	Nilai EKPPD Tahun 2018 atas LPPD Tahun 2017 Kepmendagri No. 118-8840 Tahun 2018

TAHUN		SKOR	PREDIKAT	PERINGKAT NASIONAL	KETERANGAN
LPPD	EKPPD				
2018	2019	3,1104	SANGAT TINGGI	-	Nilai EKPPD Tahun 2019 atas LPPD Tahun 2018 Belum ada pemeringkatan
2019	2020	n/a	n/a	n/a	Belum terbit

2. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah di wilayah Kecamatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap menyelenggarakan pembiaian aparatur yang bertempat di wilayah kecamatan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan sasaran ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kegiatan ini sebagai upaya menyampaikan informasi kebijakan daerah dan juga sebagai forum untuk menampung berbagai permasalahan di wilayah untuk dicarikan penyelesaiannya sekaligus sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.



Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah di Kecamatan Bantarsari

3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peran Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain memberikan fasilitasi bagi penyelenggara Pemilu baik berupa sarana prasarana, penegakan peraturan perundang-undangan maupun sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta mendorong terwujudnya netralitas ASN dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Tingkat Partisipasi Pemilu

Tingkat Partisipasi Pemilu hanya dapat dihitung pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap untuk masa jabatan 2017-2022, sedangkan pada tahun 2018 telah dilaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018-2023, dan pada tahun 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan ketiga pemilu / pilkada tersebut, maka telah tercapai tingkat partisipasi Pemilu Kabupaten Cilacap yang semakin baik, dengan rincian sebagai berikut :

Tingkat Partisipasi Pemilu / Pilkada di Kabupaten Cilacap

PEMILU / PILKADA	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	TINGKAT PARTISIPASI
2017	1.472.242	937.929	63,71
2018	1.442.974	946.272	65,58
2019	1.506.214	1.082.186	71,85

Sumber data : Badan Kesbangpol Kabupaten Cilacap

Capaian tersebut merupakan hasil dari seluruh stakeholder pemilu baik penyelenggara pemilu / pilkada, peserta pemilu / pilkada maupun Pemerintah

Daerah untuk memberikan sosialisasi kesadaran penggunaan hak pilih kepada masyarakat pada saat pemilu / pilkada.

Partisipasi suara sah pemilih dalam pemilu

Partisipasi suara sah pemilih dalam pemilu sama dengan capaian Tahun 2019 sebesar 98,41. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 tidak diselenggarakan kegiatan pemilu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Pilkada) sehingga tahun 2021 tetap menggunakan capaian tahun 2019.

Sasaran dengan indikator Prosentase pemilih yang berpartisipasi pada pemilu dihitung dari jumlah suara yang sah dibandingkan dengan jumlah seluruh suara. Capaian ini telah melampaui target hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, selain itu peran KPU yang semakin aktif dalam melakukan sosialisasi Pemilu.

Persentase Suara Sah Dalam Pemilu/Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Cilacap

Pemilu tahun	Jumlah suara	Jumlah suara sah	Jumlah suara tidak sah	suara sah
2017	937,486	913,523	23,963	97.44
2018	945,840	924,414	21,426	97.73
2019	1,082,186	1,065,010	17,176	98.41

Sumber data : KPU Kabupaten Cilacap

Netralitas ASN

Sebagai upaya mewujudkan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap aktif menyampaikan pengarahan dan sosialisasi, salah satunya melalui kegiatan Pojok Pengawasan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Cilacap. Acara

tersebut berupa WEBINAR bertemakan “Meneguhkan Komitmen Netralitas Aparatur Sipil Nrgara (ASN) pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah” yang diselenggarakan secara daring melalui Aplikasi ZOOM meeting dan juga kanal Youtube @bawaslucilacap yang di ikuti oleh sekitar 700 peserta dari jajaran Bawaslu, ASN maupun masyarakat umum



Pojok Pengawasan Bawaslu Cilacap - Webinar Netralitas ASN

4. Penanggulangan dan Penanganan Bencana

Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD Kabupaten Cilacap, dalam penanggulangan dan penanganan Bencana telah dicapai antara lain :

Berkurangnya kerugian akibat bencana

Wilayah Cilacap memiliki potensi bencana cukup lengkap, antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, tsunami dan abrasi di kawasan pesisir. Kabupaten Cilacap telah menyusun rencana penanggulangan bencana dan mitigasi bencana yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan tata ruang. Penguatan sistem ketahanan bencana melalui penataan bangunan di daerah rawan bencana , rintisan desa tangguh bencana dan optimalisasi fungsi pusdalop kebencanaan dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada menjadi prioritas pembangunan. Hal ini

apabila diselesaikan akan berpengaruh pada pengurangan korban bencana dan pengurangan kerugian akibat bencana.

Selama tahun 2021 telah terjadi 122 kali bencana dengan total kerugian mencapai Rp. 4.314.655.000,-, kerugian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yang sebesar Rp. 27.017.246.000,- dengan kejadian 173 kali bencana.

Perbandingan total kerugian dengan kejadian bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Total Kerugian	Perbandingan Total Kerugian dengan Kejadian bencana
2017	148	22.264.687.000	150.437.074,32
2018	140	20.717.394.000	147.981.385,71
2019	68	11.392.080.000	167.530.588,24
2020	173	27.017.246.000	156.169.052,02
2021	122	4.314.655.000	35.366.024,59

Apabila dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2021, kerugian akibat bencana mengalami fluktuatif. Namun demikian secara umum upaya mitigasi bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana mulai menunjukkan keberhasilan sehingga dapat meminimalisir kerugian dan korban.

Persentase penurunan kerugian akibat bencana

Sebagai daerah rawan bencana, Kabupaten Cilacap harus siap menghadapi segala risiko bencana. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap bencana sehingga dapat menurunkan kerugian akibat bencana.

Selama kurun waktu 2017-2021 persentase penurunan kerugian akibat bencana menunjukkan nilai yang fluktuatif, salah satu penyebabnya adalah adanya

bencana dengan intensitas yang tinggi dan masif sehingga meningkatkan kerugian akibat bencana, serta kurangnya budaya kesiapsiagaan bencana di masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya melakukan upaya-upaya penurunan kerugian akibat bencana melalui pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Capaian persentase penurunan kerugian akibat bencana pada tahun 2018 menurun sebesar 6,95, pada tahun 2019 menurun sebesar 45,01 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 137,16 yang disebabkan oleh kejadian bencana dengan intensitas yang tinggi dan masif, salah satunya adanya banjir di 5 kecamatan sebanyak 2 kali. Kejadian bencana di tahun 2020 tersebut akibat dari dampak Lanina yang meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia termasuk Cilacap. Pada tahun 2021 persentase kerugian akibat bencana kembali menurun sebesar 84,03 dari tahun sebelumnya.

Persentase desa tangguh bencana

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Realisasi indikator sasaran Prosentase desa tangguh bencana tahun 2020 sama dengan tahun 2019 yaitu sebesar 9,15, karena pada tahun 2020 tidak ada Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 tercapai 13,2 melalui Kegiatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan di 11 desa yaitu :

1. Desa Wlahar Kecamatan Adipala;
2. Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan;
3. Kelurahan Kebon Manis Kecamatan Cilacap Selatan;
4. Desa Kleces Kecamatan Kampung Laut;

5. Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut;
6. Desa Ujung Gagak Kecamatan Kampung Laut;
7. Desa Panikel Kecamatan Kampung Laut;
8. Desa Sidayu Kecamatan Binangun;
9. Desa Rejamulya Kecamatan Kawunganten;
10. Desa Karangkemiri Kecamatan Maos;
11. Desa Pangadegan Kecamatan Majenang

Pengembangan Desa Tangguh Bencana tahun 2017-2021

Tahun	Kecamatan	Desa	Jenis Bencana
2017	Kroya	Mujur	Banjir
	Dayehuluhur	Cilumping	Longsor
2018	Cimanggu	Cijati	Longsor
	Bantarsari	Rawajaya	Banjir
2019	Karangpucung	Babakan	Longsor
	Nusawungu	Banjarsari	Tsunami
2020	-	-	-
2021	Adipala	Wlahar	Tsunami
	Cilacap Selatan	Cilacap	Tsunami
	Cilacap Selatan	Kebon Manis	Tsunami
	Kampung Laut	Kleces	Tsunami
	Kampung Laut	Ujung Alang	Tsunami
	Kampung Laut	Ujung Gagak	Tsunami
	Kampung Laut	Panikel	Tsunami
	Binangun	Sidayu	Tsunami
	Kawunganten	Rejamulya	Tsunami
	Maos	Karangkemiri	Tsunami
	Majenang	Pangadegan	Longsor

5. Penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda negeri kita termasuk Kabupaten Cilacap. Hal ini telah berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan masyarakat, baik sektor ekonomi, sosial maupun sektor lainnya. Oleh karena itu, sebagai langkah penanganan Covid-19 di Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap menetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 360/689/39/ Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Cilacap. Didalam Satgas tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap berkedudukan sebagai Wakil Ketua VI dengan tugas antara lain terkait dengan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan.



Rakor Kesiapsiagaan Kabupaten Cilacap Menghadapi Covid-19

Hasil yang telah dicapai pada penegakan protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 sebagai berikut :

**Capaian Penegakan Perda Protokol Kesehatan Covid-19
Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2022**

No	Periode	Jumlah Pelanggar
1	Tahun 2020	27.299
2	Januari - Mei 2021	13.339
3	1 Juni 2021 - 5 Maret 2022	5.631
	Jumlah s.d. 5 Maret 2022	47.182
	Total Denda	Rp. 34.507.000

Sumber : Satpol PP Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Cilacap terhadap disiplin protokol kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 semakin meningkat.

Disamping itu sebagai langkah optimalisasi pencegahan Covid-19 di Kabupaten Cilacap, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan pembinaan wilayah di kecamatan se-Kabupaten Cilacap yang meliputi :

- a. Evaluasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 di masing-masing kecamatan
- b. Menginventarisir permasalahan yang harus segera mendapatkan penyelesaian
- c. Mengoptimalkan sosialisasi / woro-woro di wilayah binaannya masing-masing
- d. Monitoring pelaksanaan karantina baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun terpusat di kecamatan / desa

Melalui langkah-langkah tersebut, pandemi Covid-19 di Kabupaten Cilacap semakin terkendali. Hal ini ditunjukkan dari penerapan PPKM dengan level yang semakin baik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap di Tahun 2021.

C. Pelaksanaan Bidang Perekonomian Dan Pembangunan

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai tindak lanjut terpilihnya H. Tatto Suwanto Pamuji dan Syamsul Auliya Rachman, S.STP, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2017-2022 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017, maka harus disusun RPJMD Kabupaten Cilacap mendasari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Oleh karena itu sesuai dengan tugas Sekretaris Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, telah disusun RPJMD Kabupaten Cilacap 2017-2022 sebagai pedoman kebijakan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun.



Musrenbang RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

Disamping itu, telah dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Cilacap.



Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

2. Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Sebagai upaya sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2018, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap menginisiasi integrasi sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi penanggaran. Aplikasi yang digunakan yaitu SIPPeCI untuk perencanaan dan SIGAP untuk penganggaran.

Dengan adanya integrasi ini manfaat yang dicapai yaitu :

1. Perencanaan Pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu.
2. Terciptanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
3. Efisiensi pengalokasian anggaran dalam belanja daerah.
4. Memastikan perencanaan pelaksanaan program & kegiatan serta penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hal ini mendapat apresiasi dari KPK Divisi Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan. Namun dengan munculnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diinisiasi oleh Kemendagri pada tahun 2020, maka seluruh daerah di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga integrasi SIPPeCI dan SIGAP di Kabupaten Cilacap di tahun 2020 sudah tidak digunakan lagi.

3. Capaian Pelaksanaan Pembangunan

Monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) yang dilaksanakan setiap Triwulan.



Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK)

Berdasarkan olah data Pengendalian Operasional Kegiatan, capaian pelaksanaan kegiatan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran		Fisik		Keterangan
	Alokasi	Realisasi	Target	Realisasi	
2018	1.458.367.789.555	1.311.453.499.975,00	100	97,8	Belanja Langsung
2019	1.724.416.257.096	1.507.958.535.825,00	100	95,2	Belanja Langsung
2020	1.497.935.085.432	1.333.313.292.296,00	100	96,2	Belanja Langsung
2021	3.543.157.686.542	3.269.041.462.186,80	100	98,1	Belanja Daerah

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan

4. Laju Inflasi

Disamping itu sesuai dengan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 500/445/06/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Cilacap, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap berkedudukan sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cilacap.



Rakor TPID secara virtual

Perkembangan Perkembangan Laju Inflasi bulanan di tahun 2021, menunjukkan bahwa selama kurun waktu dua belas bulan laju inflasi di Kabupaten Cilacap cenderung mengalami fluktuasi. Dari dua belas bulan tersebut ada dua bulan yang mengalami deflasi. Di Kabupaten Cilacap terjadi deflasi sebesar 0,25 persen di bulan Juni dan 0,12 persen di bulan September. Tingginya inflasi di bulan November terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran, yaitu pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Penyebab utama terjadinya inflasi di Kota Cilacap adalah naiknya harga minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, dan sabun detergen bubuk/cair. Sedangkan komoditas utama yang menahan laju inflasi di Kota Cilacap antara lain turunnya harga bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kangkung, dan ikan belanak.

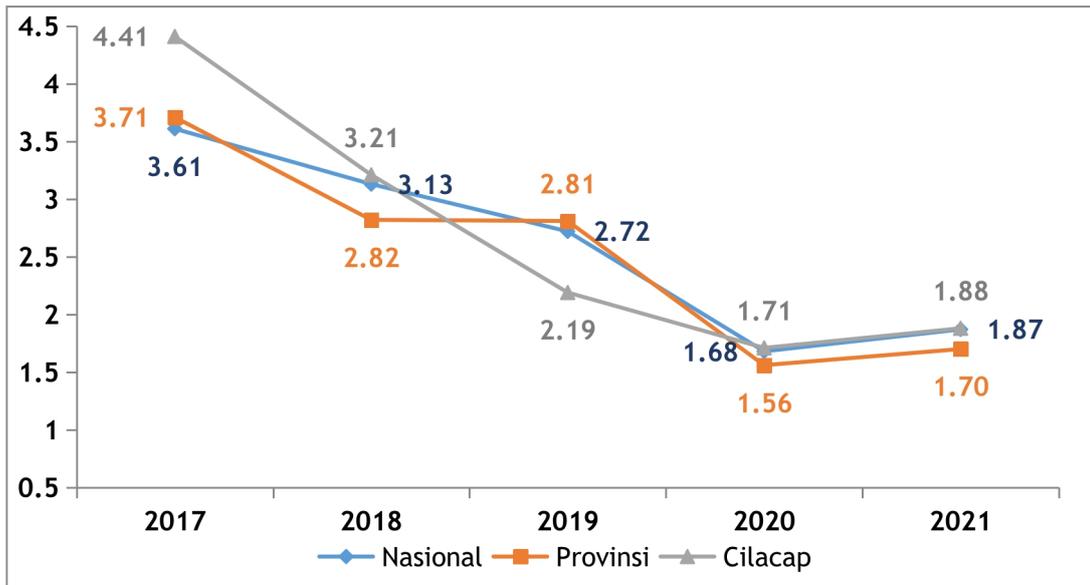
**Laju Inflasi Kabupaten Cilacap Dirinci Per Bulan
Tahun 2017-2021 (persen)**

Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	1,60	1,33	0,33	-0,03	0,27
Februari	0,69	0,38	-0,25	0,49	0,12
Maret	-0,11	-0,11	0,32	0,06	0,03
April	0,01	-0,11	0,26	0,05	0,05
Mei	0,59	-0,08	0,19	0,29	0,25
Juni	0,99	0,76	0,75	0,28	-0,25
Juli	-0,44	0,09	0,14	-0,17	0,06
Agustus	-0,23	-0,12	0,33	-0,09	0,06
September	0,25	-0,13	-0,46	-0,03	-0,12
Oktober	0,02	0,41	-0,07	0,12	0,23
November	0,39	0,31	0,16	0,39	0,36
Desember	0,60	0,45	0,50	0,35	0,82
Inflasi Tahun Kalender	4,41	3,21	2,19	1,71	1,88

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

Inflasi di tahun 2021 tercatat meningkat menjadi 1,88 persen, lebih tinggi dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 1,71 persen. Inflasi tahun kalender 2019 lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender 2018, jika diasumsikan tidak ada kondisi ekonomi yang berubah secara ekstrim.

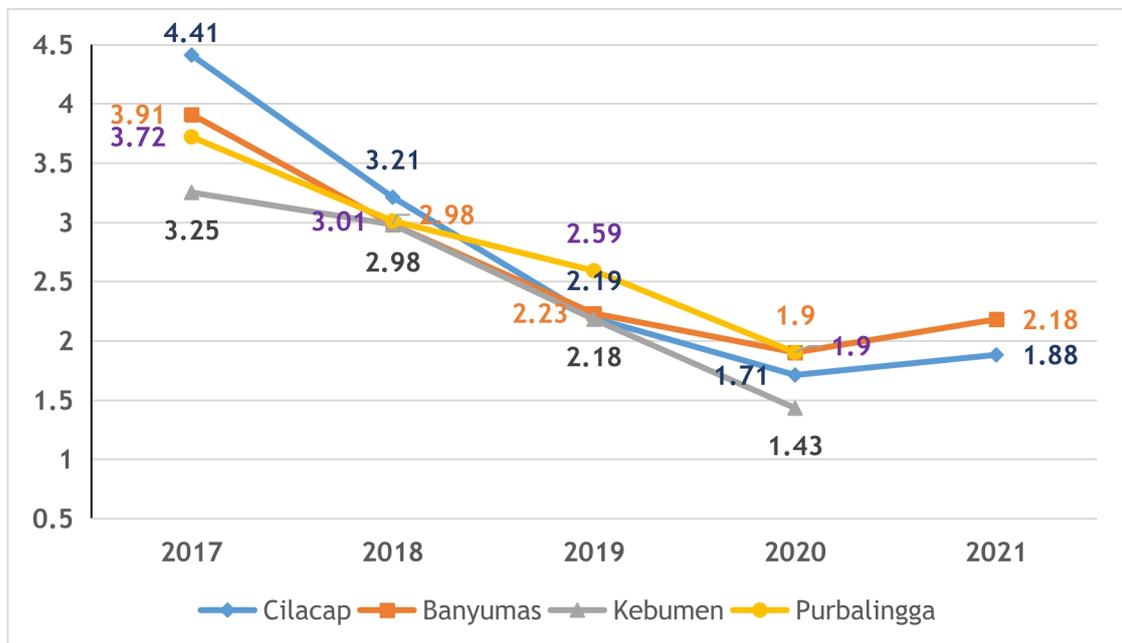
Inflasi Kabupaten Cilacap dari tahun 2017-2021 menunjukkan capaian yang fluktuatif seperti halnya nasional dan provinsi. Lebih rinci dapat kita lihat pada gambar berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Sedangkan inflasi per tahun Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten tetangga sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

Inflasi per Tahun Kab. Cilacap dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2021

Apabila dibandingkan sampai dengan bulan November tahun 2021, perkembangan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dengan laju inflasi Kabupaten Cilacap di bawah laju inflasi Nasional dan sedikit di atas laju inflasi Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar 1,29 persen dan 1,05 persen.

**Laju Inflasi Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
dirinci Menurut Bulan Tahun 2021 (persen)**

Bulan	Cilacap	Jawa Tengah	Nasional
Januari	0,27	0,22	0,26
Februari	0,12	0,17	0,1
Maret	0,03	0,08	0,08
April	0,05	0,04	0,13
Mei	0,25	0,17	0,32
Juni	-0,25	-0,17	-0,16
Juli	0,06	0,06	0,08
Agustus	0,06	-0,01	0,03
September	-0,12	-0,10	-0,04
Oktober	0,23	0,25	0,12
November	0,36	0,34	0,37
Desember	0,82	0,64	0,57
Inflasi Tahun Kalender	1,88	1,70	1,87

Sumber : BPS Kab. Cilacap Tahun 2022

D. Pelaksanaan Bidang Administrasi Umum

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Di era desentralisasi ini pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dan dapat mengurus daerahnya tanpa harus bergantung dengan dana dari pemerintah pusat, oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pemasukan kas daerah yang digunakan dalam

menjalankan pemerintahan, memenuhi kebutuhan daerahnya dan melakukan pembangunan.

Besarnya pendapatan asli daerah sendiri menjadi cerminan bagaimana kemandirian suatu daerah untuk membiayai kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin tinggi PAD suatu daerah maka pembangunan daerah, kesejahteraan rakyat di daerah tersebut diharapkan akan semakin baik pula.

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 12,27 dengan rincian Pajak Daerah naik rata-rata sebesar 6,2, retribusi daerah turun rata-rata 18,85, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik sebesar 46,02 dan lain- lain PAD yang Sah naik rata-rata 17,34.

**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2018-2021 (dalam milyar rupiah)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022 *)	Tumbuh Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	527,58	574,08	591,34	739,13	742,03	12,27
Pajak Daerah	185,94	209,48	203,19	221,38	287,39	6,2
Retribusi Daerah	43,48	44,74	18,97	18,62	28,12	(18,85)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	18,46	26,19	44,68	56,11	57,57	46,02
Lain-Lain PAD Yang Sah	279,69	293,87	324,51	443,02	368,95	17,34

*) target 2022

Sumber : BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap terus menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Tahun 2021 rasio ketergantungan keuangan sebesar 72,90 lebih baik dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 77,30.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat potensi pendapatan baru yang dapat meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah. Potensi pendapatan baru tersebut diantaranya terkait dengan porsi dana bagi hasil PKB dan BBNKB melalui revisi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil yang bersumber dari pertambangan minyak bumi bagi daerah pengolah migas melalui revisi Undang Nomor 33 Tahun 2014, dengan potensi pendapatan baru ini diharapkan Pendapatan Asli Daerah Rp. 1 Trilyun bisa segera tercapai.

Disamping itu, peningkatan kinerja BUMD pun terus dipacu agar dapat memberikan peningkatan deviden/bagian laba yang signifikan terhadap daerah. Data realisasi bagian laba BUMD tahun 2018-2021 sebagai berikut :

Realisasi Bagian Laba BUMD Tahun 2018-2021
(dalam milyar rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022 *)	Tumbuh Realisasi
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	18,46	26,19	44,68	56,11	57,57	46,02

*) target 2022

Sumber : BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

2. Belanja Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan konkuren yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Hal ini menjadikan kewenangan Pemerintah Daerah semakin luas, sehingga potensi keuangan harus dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien dan efektif dengan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan *money follow program* serta dikelola secara transparan agar tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat

Oleh karena itu kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah dikelola secara tertib dan transparan berbasis akrual sesuai dengan asas efisien, efektif dan akuntabel.
2. Belanja daerah diutamakan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pemenuhan belanja daerah yang bersifat mandatory peraturan perundang-undangan. Selanjutnya belanja program unggulan kepala daerah, belanja prioritas perangkat daerah, dan belanja tidak langsung di luar belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh DAK) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

4. Belanja bantuan keuangan khusus terhadap pemerintah desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat dan penanganan bencana.
6. Belanja daerah urusan wajib dan urusan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam prioritas pembangunan daerah.
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (Pusat) dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
8. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan.
9. Mengatasi permasalahan yang diperlukan oleh masyarakat luas secara langsung agar tercipta stabilitas ekonomi daerah.
10. Mitigasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana alam.
11. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
12. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
13. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
14. Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.

Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran akan sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian, apabila besaran penerimaan pendapatan daerah relatif kecil dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana.

Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap dari Tahun 2018 - 2022 sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Alokasi Belanja	3.260.826.228.955,00	3.566.393.467.051,00	3.439.138.324.737,00	3.543.157.686.542,00
Realisasi Belanja	2.985.422.839.102,00	3.283.321.137.886,20	3.088.834.820.260,00	3.269.041.462.186,80
% Penyerapan Anggaran	91,55	92,06	89,81	92,26

Sumber : BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Sedangkan alokasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 3.503.687.435.633,00

3. Opini BPK

Opini BPK dapat dilihat dari hasil penilaian atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang objektif dapat dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari aspek pengelolaan keuangan. Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian yang berhasil (WTP). Diharapkan realisasi ini dapat dipertahankan untuk tahun berikutnya



Rapat Persiapan Menghadapi Pemeriksaan BPK

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP) antara lain :

1) Peningkatan Pengelolaan Aset Tetap

Peningkatan pengelolaan aset tetap yang meliputi : penyajian informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan, aset tetap didukung dengan catatan/data, penatausahaan aset tetap telah memadai, aset tetap diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak ketiga/pihak lain, dan aset tetap didukung dengan bukti kepemilikan. Telah melaksanakan pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan fisik.

SDM yang menangani asset selalu meningkat kompeten dan kapasitasnya dan benar- benar menerapkan peraturan pemerintah dan peraturan Mendagri tentang pengelolaan barang milik daerah.

2) Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan berdasarkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3) Tingkat pengungkapan

Akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah telah diungkapkan secara cukup atau memadai dalam CaLK, artinya segala informasi mengenai akun-akun seperti kas, persediaan, aset tetap telah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan disajikan secara informatif sehingga para stakeholder (pemangku kepentingan) mudah dan paham ketika membaca laporan tersebut.

4) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap

Opini BPK	2017	2018	2019	2020	2021
	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Cilacap

4. Peningkatan Kesejahteraan ASN

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap antara tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 juga cukup signifikan dengan kenaikan rata rata setiap level sebesar 98,34.

Peningkatan Besaran TPP ASN Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022

Pangkat/ Golongan	2018	2019	2020	2021	2022	Kenaikan
Golongan 2	936.000	1.768.000	2.068.000	2.440.000	2.440.000	160,68
Golongan 3	1.352.000	2.060.000	2.480.000	2.967.000	2.927.000	116,49
Golongan 4	1.352.000	2.354.000	2.854.000	3.368.000	3.368.000	149,11
Eselon IV	2.964.000	4.072.000	4.143.000	4.907.500	4.907.500	65,57
Eselon III- Kabid	4.056.000	5.626.000	5.714.000	6.454.000	6.454.000	59,12
Eselon III - Sekretaris	4.914.000	6.412.000	6.886.000	8.331.500	8.331.500	69,55
Eselon II - Kepala OPD	7.281.000	10.872.000	10.981.000	12.220.000	12.220.000	67,83
RATA- RATA KENAIKAN TAHUN 2018 - 2022						98,34

Sumber : BPPKAD Kabupaten Cilacap Tahun 2022

Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan pegawai, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM, mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan kesadaran religiusnya dengan menunaikan zakat/infaq/shodaqoh melalui Baznas Kabupaten Cilacap, sehingga capaian Baznas Kabupaten Cilacap meningkat sangat signifikan sebagai berikut :



Sumber : Baznas Kabupaten Cilacap

**Grafik Realisasi Pengumpulan ZIS Baznas Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2021**

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap terlihat dari hasil nilai evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Pada tahun 2021 masih menggunakan nilai hasil evaluasi Tahun 2020 dikarenakan hasil evaluasi belum keluar. Berdasarkan data hasil evaluasi selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh selalu mengalami peningkatan. Nilai AKIP Tahun 2020 atas evaluasi Tahun 2019 sebesar 73,74 dari target yang ditetapkan sebesar 71 dengan prosentase pencapaian 103,85 dengan kategori Sangat Berhasil

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
Perencanaan Kinerja	35	22,78	21,47	22.00	23,39	23,49	23,49
Pengukuran Kinerja	20	15,23	16,4	19.73	19,86	19,87	19,87
Pelaporan Kinerja	15	9,80	9,25	11.07	11,36	11,50	11,50
Evaluasi Kinerja	10	4,87	6,18	6.78	6,83	6,99	6,99
Capaian Kinerja	20	11,03	12,12	11.04	11,75	11,91	11,91
Nilai hasil Evaluasi	100	63,71	65.42	70.61	73,19	73,74	73,74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	BB	BB	BB	BB

Sumber : Kementerian PAN dan RB Tahun 2020

Faktor yang mendukung pencapaian keberhasilan Pemerintah kabupaten Cilacap antara lain karena telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya; Pemkab Cilacap telah membangun dan mengimplementasikan sistem perencanaan kinerja berbasis teknologi informasi yang terintegrasi yaitu e-planning, e-budgeting dan e-SAKIP; pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja dan keuangan dengan berbasis teknologi informasi serta adanya evaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat mengidentifikasi potensi adanya penggunaan anggaran yang kurang efektif dan efisien.

Strategi untuk mendukung upaya penyempurnaan sesuai rekomendasi Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia :

- a. Melakukan perbaikan terhadap komponen perencanaan kinerja dengan memperhatikan kaidah result oriented (hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat) dan integrated development plan (perencanaan terpadu atau terintegrasi)

- b. Memastikan definisi tujuan dan sasaran kinerja yang ada pada dokumen perencanaan telah berorientasi hasil (outcome) dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- c. Memastikan kualitas indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART
(Spesifik/Rinci/Jelas, Measurable/Terukur, Achievable/Realistis, Relevan/Sesuai dengan kondisi, Timely/Bisa diselesaikan tepat waktu) dengan Fokus pada measurable disertai kejelasan formulasi pengukuran dan kecukupan
- d. Menyempurnakan cascading kinerja sampai level individu pelaksana (sudah dilaksanakan) namun kinerja individu ini belum menunjang pencapaian kinerja organisasi dan belum sebagai dasar pemberian reward and punishment

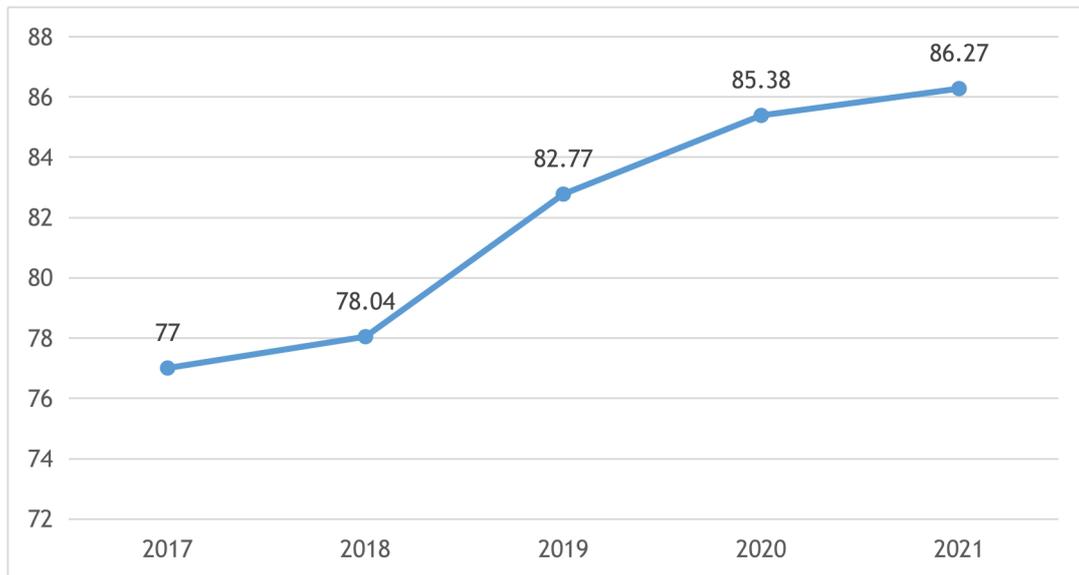
6. Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada tahun 2021 capaian rata-rata nilai SKM 86,27 atau naik sebesar 1,04 dari realisasi tahun 2020 sebesar 85,38. Keberhasilan ini dikarenakan antara lain: tingkat kepatuhan perangkat daerah/unit kerja penyelenggara terhadap penyusunan dokumen SP yang semakin tinggi; penyediaan sarpras pendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang mensuprot kebutuhan para pengguna layanan; profesionalisme SDM pemberi layanan yang telah sesuai dengan kompetensi dan kode etik pelayanan; tersusunnya mekanisme kerja bagi petugas layanan telah diterapkan aplikasi SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat) dimana aplikasi ini langsung digunakan oleh pengguna layanan sehingga hasil survey lebih akurat.

Untuk itu upaya yang harus dilakukan Pemerintah Cilacap untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai rata-rata SKM antara peningkatan kualitas

pelayanan publik dengan e-smart, peningkatan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan terdepan dan menciptakan inovasi- inovasi dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik.



**Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Cilacap tahun 2017-2021**



Penghargaan Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik

BAB IV
CATATAN YANG PERLU DITINDAKLANJUTI

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap mengelola APBD sebesar **Rp. 70.731.851.693,-** terdiri dari :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	70.731.851.693
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.412.500
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.350.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.062.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.888.811.108
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.174.872.008
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.616.989.100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	44.450.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	130.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	130.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.292.700.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.628.125.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	633.125.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	270.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.800.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	961.450.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	666.165.900
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	247.217.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	418.948.400
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.234.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.412.368.150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	750.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	975.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.090.938.150
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	596.430.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.192.155.835
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.192.155.835
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.206.875.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.200.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.650.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	356.875.000
Penataan Organisasi	1.289.621.900
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	213.710.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	615.187.500
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	350.361.900
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	110.362.500
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.467.742.000
Fasilitasi Keprotokolan	967.982.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	214.760.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	285.000.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.876.766.800
Administrasi Tata Pemerintahan	724.980.850
Penataan Administrasi Pemerintahan	156.859.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	533.596.850
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	34.525.000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	15.242.735.950
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.544.901.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.743.704.050
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	954.130.900
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	628.175.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	135.899.000
Fasilitasi Bantuan Hukum	320.401.000

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	171.875.000
Fasilitasi Kerjasama Daerah	280.875.000
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	280.875.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	12.038.232.500
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.778.012.500
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	280.500.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	137.825.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1.359.687.500
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	6.851.200.000
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	431.925.000
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	359.275.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6.060.000.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.304.945.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.104.021.300
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	61.545.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	139.378.700
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	104.075.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	104.075.000

Realisasi anggaran sampai dengan Maret / Februari 2022 sebesar Rp 3.225.745.208,- dan telah dipertanggungjawabkan (SPJ) sebesar Rp. 2.820.347.391,-

2. Pembentukan Kecamatan Kahuripan

Dalam melaksanakan tugas membantu Bupati Cilacap, salah satu kebijakan yang belum tuntas yaitu Pembentukan Kecamatan Kahuripan. Pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Ketiga persyaratan tersebut yang telah terpenuhi sebagai berikut :

a. Persyaratan Dasar :

- 1) Luas wilayah minimal yaitu 7,5 Km², Kecamatan Kahuripan mampu memenuhi itu yaitu 51.45 Km²
- 2) Cakupan Kecamatan Kahuripan yaitu sebanyak 10 Desa mampu memenuhi jumlah cakupan desa yang dipersyaratkan.

Kecamatan Kahuripan dibentuk dari penggabungan bagian Kecamatan Kesugihan dan Kecamatan Jeruklegi, wilayah Kecamatan Kahuripan terdiri dari :

a) Kecamatan Kesugihan, yang terdiri dari:

- (1) Desa Menganti;
- (2) Desa Karangkandri;
- (3) Desa Kuripan;
- (4) Desa Dondong;
- (5) Desa Planjan;
- (6) Desa Kuripan Kidul;
- (7) Desa Jangrana

b) Kecamatan Jeruklegi, yang terdiri dari:

- (1) Desa Tritih Wetan;
- (2) Desa Sumingkir; dan
- (3) Desa Mandala.

- 3) Usia minimal Kecamatan yaitu 5 tahun, untuk Kecamatan Kesugihan telah berdiri sejak 1968 dan Kecamatan Jeruklegi telah berdiri sejak 1964

b. Persyaratan Teknis

1) Kemampuan keuangan daerah;

Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Pada tahun 2022 rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah sebesar 31,86%

2) Persyaratan teknis lainnya

- a) kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat
- b) nama Kecamatan yang akan dibentuk;
- c) lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
- d) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Persyaratan ini telah dipenuhi dengan kajian yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah tahun 2019.

Persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi, sebagai berikut :

a. Persyaratan Dasar :

Jumlah penduduk minimal

Jumlah penduduk yang disyaratkan untuk pemekaran adalah sebesar 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) KK untuk tiap desa, berdasarkan data BPS tahun 2019 terdapat 3 (tiga) desa yang memiliki penduduk dibawah 6000 jiwa yaitu Desa Jangrana terdiri dari 5152 Jiwa, Desa Sumingkir terdiri dari 5835 jiwa dan Desa Mandala terdiri dari 517 Jiwa.

b. Persyaratan Teknis

Sarana dan prasarana pemerintahan;

Sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan lahan kantor Kecamatan Kahuripan. Terdapat dua lokasi yang

telah disurvei namun harga yang diminta oleh masyarakat masih terlalu tinggi dengan harga taksiran sehingga belum ada kesepakatan harga.

C. Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif berupa kesepakatan musyawarah Desa di Kecamatan induk; dan di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk telah dilaksanakan namun belum didokumentasikan dalam Berita Acara kesepakatan

3. Pembangunan Mushola Setda

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap khususnya yang beragama Islam, perlu adanya tempat ibadah / mushola yang representatif. Oleh karena itu sejak 2020 telah diusulan pembangunan / rehap mushola Baitusaalam Setda Kabupaten Cilacap, namun karena pandemi Covid-19, rencana tersebut baru akan direalisasikan pada tahun 2022.

4. Pembentukan Mal Pelayanan Publik

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibentuk Mall Pelayanan Publik agar pelayanan publik semakin cepat, terjangkau dan mudah. Untuk itu dalam rangka membantu Bupati Cilacap, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap sebagai Penanggung Jawab Tim bersama-sama seluruh pejabat dalam Tim Persiapan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Cilacap, telah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Penetapan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik
- c. Penetapan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 061/252/10/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Persiapan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Cilacap

Tahapan yang perlu untuk ditindaklanjuti :

- a. Inventarisir unit pelayanan publik yang akan bergabung dalam Mal Pelayanan Publik
- b. Penyusunan MoU / PKS dengan instansi vertikal / BUMD / BUMN yang akan bergabung dalam Mal Pelayanan Publik
- c. Pemenuhan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik
- d. Penyusunan Mekanisme Pelayanan MPP
- e. Pemenuhan Sumber Daya Manusia MPP

5. Belum tersedianya SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 diamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Kondisi saat ini di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Cilacap selaku UKPBJ belum ada Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai ketentuan yang ada, masih dilakukan oleh ASN Fungsional Umum.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu dari 8 area intervensi dalam penilaian MCP (Monitoring Centre of Prevention) KPK-RI. Dengan kondisi belum adanya JF PPBJ, maka KPK-RI masih memberikan dinilai 0 (nol). Untuk itu perlu segera pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Cilacap.

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan tugas sebagai ASN merupakan tugas yang mulia karena merupakan sebuah profesi untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, jangan pernah dilupakan bahwa tugas utama ASN adalah untuk melayani masyarakat, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apapun posisi kita sebagai ASN harus dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berikanlah kemudahan-kemudahan pelayanan kepada masyarakat, bukan malah mempersulit masyarakat.

Disamping itu, ASN juga berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu tetaplah kompak dalam semangat kebersamaan, baik antar ASN maupun dengan masyarakat. Berikanlah kesejukan melalui tutur kata dan perbuatan kita. Damaikanlah yang bertikai, berilah jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang ada. Jadilah penengah tanpa memihak untuk kepentingan bangsa dan negara.

Setelah purna tugas sebagai ASN, bukanlah berarti tugas kita untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa selesai, namun hal ini harus tetap berlanjut. Kita harus dapat hidup bersama-sama masyarakat dalam kedamaian dan dapat memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. *“Jadilah tuntunan jangan jadi tontonan”*

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Tugas saya sebagai Sekretaris Daerah, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dan mohon maaf terhadap kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang belum dapat saya selesaikan.





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH

JI. MT. Haryono No. 73 Telp. (0282) 534060, Fax. (0282) 520248
 WEBSITE : <http://www.bkd.cilacapkab.go.id> E-MAIL : BKD@cilacapkab.go.id

BIODATA PEGAWAI

LOKASI KERJA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
 SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

IDENTITAS PEGAWAI

NIP : 196203221986071002
 NAMA : Drs. FARID MA'RUF S.T., M.M.
 TEMPAT LAHIR : Banjarnegara
 TANGGAL LAHIR : 22-03-1962
 JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
 AGAMA : Islam
 STATUS PEGAWAI : PNS
 JENIS KEPEGAWAIAN : ASN Daerah Otonom
 STATUS PERKAWINAN : KAWIN
 KEDUDUKAN PEGAWAI : Aktif
 ALAMAT : JL.PENDAWA NO.85,TRITIH W, JERUKLEGI TEL. 543825, 53252



TELEPON : 081226765758
 NO KARPEG : E 485353
 NO KARTU ASKES : 0000080717657
 KARTU TASPEN : 010208162
 KARTU KARIS/KARSU : 221874 C
 NPWP : 49.457.887.5.522.000

PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS

NO SK CPNS : 813.2/3562/86
 TGL SK CPNS : 27-10-1986
 PANGKAT CPNS : II/b PENGATUR MUDA TK I
 TMT CPNS : 01-07-1986
 MASA KERJA : 3 tahun 0 bulan

PENGANGKATAN SEBAGAI PNS

NO SK PNS : 821.1/ 10454/ 07
 TGL SK PNS : 14-06-1989
 PANGKAT PNS : II/b PENGATUR MUDA TK I
 TMT PNS : 01-07-1989
 MASA KERJA : tahun bulan

KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR

NO SK : 00798/23301/AZ/09/21
 TGL SK : 16-09-2021
 PANGKAT : IV/e PEMBINA UTAMA
 TMT : 01-03-2022
 MASA KERJA : 33 tahun 8 bulan

KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) TERAKHIR

NO SK : 822.4/100/38
 TGL SK : 28-05-2020
 TMT : 01-07-2020
 MASA KERJA : 32 tahun 0 bulan
 GAJI POKOK : Rp. 5661700

PENDIDIKAN UMUM TERAKHIR

NO IJAZAH : 1234
 TGL IJAZAH : 2002

TINGKAT PENDIDIKAN : S-2
 JURUSAN PENDIDIKAN : S-2 MAGISTER MANAJEMEN
 SEKOLAH / UNIVERSITAS : STIE MITRA INDONESIA
 TEMPAT : YOGJAKARTA

DIKLAT STRUKTURAL TERAKHIR

STTP NO : 26.458/DIKLATPIM TK.II-XIX/VII/2013
 STTP TANGGAL : 2013-07-11
 NAMA DIKLAT :
 TEMPAT : SEMARANG
 PENYELENGGARA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 TANGGAL MULAI : 30-04-2013
 TANGGAL SELESAI : 11-07-2013
 JUMLAH JAM : -

JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL TERAKHIR

NO SK : 821.2/046/2021
 TGL SK : 22-02-2021
 TMT : 23-02-2021
 ESELON : II.a
 NAMA JABATAN : SEKRETARIS DAERAH

DAFTAR RIWAYAT**A. Riwayat Jabatan**

No	Jabatan	Jenis	Eselon	Pejabat Menetapkan	No. SK	Tgl. SK	TMT Jabatan	Unitkerja
1	SEKRETARIS DAERAH	Struktural	II.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/046/2021	22-02-2021	23-02-2021	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIS DAERAH	Struktural	II.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/076/2018	05-03-2018	21-03-2018	SEKRETARIAT DAERAH
3	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Struktural	II.b	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/160/2016	30-12-2016	04-01-2017	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Struktural	II.b	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/01/2014	02-01-2014	02-01-2014	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN CILACAP	Struktural	II.b	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/010/5/2012	23-04-2012	23-04-2012	
6	SEKRETARIS DINAS BINA MARGA, SDA, ESDM	Struktural	III.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/002/S/2011	05-01-2011	05-01-2011	
7	SEKRETARIS DPU	Struktural	III.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/103/S/2010	08-10-2010	08-10-2010	
8	KABAG PEREKONOMIAN	Struktural	III.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/005/S/2010	27-01-2010	28-01-2010	
9	KABAG PEMBANGUNAN	Struktural	III.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/087/2008	16-12-2008	16-12-2008	
10	KABAG PEMBANGUNAN	Struktural	III.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/047/2006	22-05-2006	23-05-2006	
11	CAMAT KEDUNGREJA	Struktural	III.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/092/2002	06-01-2002	31-12-2002	KECAMATAN KEDUNGREJA
12	KASUBBAG PRODUKSI DAERAH	Struktural	IV.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/1292/1999	24-04-1999	24-04-1999	SUB BAGIAN PRODUKSI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
13	KASUBBAG KESEJAHTERAAN SOSIAL	Struktural	IV.a	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	821.2/041/1991	13-06-1991	13-06-1991	SUB BAGIAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH

B. Riwayat Pangkat

No	Gol. Ruang	Pejabat Menetapkan	No. SK	Tgl. SK	TMT Gol
1	IV/e	BUPATI/WALIKOTA KAB/KOTA	00798/23301/AZ/09/21	16-09-2021	01-03-2022
2	IV/d	PRESIDEN RI	00111/KEP/AA/15001/18	03-09-2018	01-10-2018
3	IV/c		25/K/2014	01-04-2014	01-04-2014
4	IV/b		823.4/1404	15-03-2010	01-04-2010
5	IV/a		823.4/0166	28-02-2006	01-04-2006
6	III/d		823.3/081/2004	01-09-2004	01-10-2004
7	III/c		813.323.3.3288	07-07-2000	01-10-2000
8	III/b		813.323/895	17-06-1996	01-10-1996
9	III/a		813.333-4095	16-12-1992	01-10-1992
10	II/c		823.2/0088/90	30-07-1990	01-10-1990
11	II/b		821.1/10454/07	14-06-1989	01-07-1989
12	II/b		813.2/3562/86	27-10-1986	01-07-1986

C. Riwayat Pendidikan

No	Tk. Pendidikan	Jurusan	Nama Sekolah	Tempat	No. Ijazah	Tgl. Ijazah
1	S-2	S-2 MAGISTER MANAJEMEN	STIE MITRA INDONESIA	YOGJAKARTA	1234	01-01-2002
2	S-1/Sarjana	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	UNIV.TIDAR	MAGELANG	00031110389	03-10-1989
3	SLTA	SMA IPS	SAMN	BANJARNEGARA	03.OC.oh. 0250580	22-04-1981
4	SLTP	SLTP UMUM	SMPN II	BANJARNEGARA	XI.Bb 75888	01-12-1977
5	Sekolah Dasar	SEKOLAH DASAR	SDN	BANJARNEGARA	XI.Aa 078004	14-12-1974

D. Riwayat Diklat Struktural

No	Nama Diklat	Tempat Diklat	Penyelenggara	Angkatan	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Lama	No. STTP	Tgl. STTP
1	DIKPIIM TK. II	SEMARANG	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	XIX	30-04-2013	11-07-2013	- Hari	26.458/DIKLATPIM TK.II-XIX/VII/2013	11-07-2013
2	DIKLAT PIM II	SEMARANG	LAN	XIX	30-04-2013	11-07-2013	- Hari	26.458/DIKLATPIM TK.II-XIX/VII/2013	11-07-2013
3	SEPAMA	CILACAP	DIKLAT PROP		12-06-2002	06-08-2002	0 Hari	20070/SPAMA/LAN/2002	
4	ADUMLA	PURWOKERTO	DIKLATR PROP		02-09-1997	15-11-1997	0 Hari	15788/ADUMLA/DDN/97	15-11-1997
5	ADUM	CILACAP	DIKLAT PROP		29-09-1993	04-12-1993	0 Hari		

E. Riwayat Diklat Fungsional

No	Nama Diklat	Tempat Diklat	Penyelenggara	Angkatan	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Lama	No. STTP	Tgl. STTP
Riwayat Diklat Fungsional tidak tersedia.									

F. Riwayat Diklat Teknis

No	Nama Diklat	Tempat Diklat	Penyelenggara	Angkatan	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	Lama	No. STTP	Tgl. STTP
1	BINTEK BIDANG HUKUM	PEMDA CILACAP			09-12-1992	12-12-1992	0 Hari	893.3/029/87	12-12-1992
2	PEMILIHAN WUIL.PADAT KARY	DEPNAKER PROP			19-08-1992	21-08-1992	0 Hari	721/ W 10/92	31-08-1992
3	KMP	CILACAP	PEMDA CILACAP	I	09-07-1992	22-07-1992	0 Hari	893.3/825/92	22-07-1992

G. Riwayat Seminar

No	Seminar	Tempat Seminar	Penyelenggara	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	No Piagam
Riwayat Data Seminar tidak tersedia.						

H. Riwayat Penghargaan

No	Tanda Jasa	Tahun	No. SK	Tanggal SK
1	SATYALANCANA KARYA SATYA	2020	16058/4/2019	22-11-2019
2		2003	079/TK/TAHUN 2003	27-10-2003

I. Riwayat Penguasaan Bahasa

No	Nama Bahasa	Jenis Bahasa	Kemampuan
Riwayat Data Penguasaan Bahasa tidak tersedia.			

J. Riwayat Hukum Disiplin

No	Jenis Hukuman Disiplin	Pejabat	NO. SK	Tgl. SK	Tgl. MUL	Tgl. SEL	Ket
Riwayat Hukum Disiplin tidak tersedia.							

K. Riwayat Sasaran Kerja Pegawai

No	Nilai Capaian SKP	Tahun	Pejabat Penilai	Jabatan Penilai
1	88.02 (Baik)	2017	H. TATTO SUWARTO PAMUJI	BUPATI CILACAP
2	89.02 (Baik)	2018	TATTO SUWARTO PAMUJI	BUPATI CILACAP
3	91.17 (Sangat baik)	2019	TATTO SUWARTO PAMUJI	BUPATI CILACAP
4	91.57 (Sangat baik)	2020	TATTO SUWARTO PAMUJI	BUPATI CILACAP

L. Riwayat Kenaikan Gaji Berkala

No	No SKKGB	TMT KGB	TGL KGB	Golongan	Masa Kerja		Gaji	Penetap
					Tahun	Bulan		
1	822.4/100/38	01-07-2020	28-05-2020	IV/d - PEMBINA UTAMA MADYA	32	0	Rp. 5,661,700	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
2	822.4/095/38	01-07-2018	22-05-2018	IV/c - PEMBINA UTAMA MUDA	30	0	Rp. 5,015,400	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
3	822.4/090/31	01-07-2016	31-03-2016	IV/c - PEMBINA UTAMA MUDA	28	0	Rp. 4,862,300	
4	822.4/065/31	01-07-2014	06-06-2014	IV/c - PEMBINA UTAMA MUDA	26	0	Rp. 4,713,800	

M. Riwayat Kenaikan Angka Kredit

No	Angka Kredit Pertama	Nama Jabatan	Nomor SK	Tanggal SK	Penilaian Angka Kredit				Kredit Utama Baru	Kredit Penunjang Baru	Kredit Baru Total
					Bulan Mulai	Tahun Mulai	Bulan Selesai	Tahun Selesai			
Riwayat Angka Kredit tidak tersedia.											

N. Riwayat Data Anak

No	Nama Anak	Tempat Lahir	Tgl. Lahir	Jenis Kelamin	Status Keluarga	Pendidikan Umum	Pekerjaan	Tunjangan
1	RA'IF CANDRA PUTRA	Cilacap	20-05-2004	Laki-laki	Anak Kandung	SLTA	-	Ya
2	FAHLIAN WISNU ALMA'ARIF	CILACAP	21-07-1990		Anak Kandung			Ya
3	FARHAN BAEKONI A (ALM)							

O. Riwayat Data Istri/Suami

No	Nama Istri/Suami	Tempat Lahir	Tgl. Lahir	No. Akta Nikah	Tgl. Nikah	NIP/NRP	Pendidikan Umum	Pekerjaan	Status
1	SUSWATININGSIH	CILACAP	05-08-1965	645/46/III/1989	31-03-1989	196508052003122001		PNS	Istri Sah

P. Riwayat Data Saudara

No	Nama	Tgl. Lahir	Pekerjaan	Umur	Keterangan	Jenis Kelamin
Riwayat Data Saudara tidak tersedia.						

Q. Riwayat Data Orang Tua

No	Nama Orang Tua	Status	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat
1	M.ASNGADI(ALM)	Ayah			
2	ROBIYAH(ALM)	Ibu			